

Peran Ibu Tunggal Sebagai Warga Binaan LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang dalam Keberlangsungan Ekonomi Keluarga

Lavinia Leda Miftachulia¹, Thriwaty Aرسال²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang
E-mail: avinleda87@students.unnes.ac.id; thriwaty_arsal@mail.unnes.ac.id

Artikel histori:

Submit: 16-04-2026

Revisi: 15-05-2026

Diterima: 03-06-2026

Terbit: 12-06-2026

Kata Kunci:

ibu tunggal, warga binaan, LAPAS Perempuan, ekonomi keluarga

Korespondensi:

avinleda87@students.unnes.ac.id

Abstract: *The study aims to analyze the economic strategies carried out by single mothers, the forms of social support they receive, and the role of independence development programs in supporting family economic sustainability. This research employs a qualitative approach using case study method. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving five single mothers as key informants and three correctional officers responsible for inmate development programs. Data analysis applied the interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion verification, supported by source and technique triangulation to ensure data validity. The findings reveal that single mothers develop adaptive economic strategies through participation in prison workshop programs, utilization of work incentives, and alternative income-generating activities such as laundry services and institutional duties. Family support and correctional independence development programs also play a significant role in strengthening family economic sustainability. The study demonstrates that single mothers as inmates are not merely objects of correctional programs, but active social actors who construct adaptive economic strategies within structural constraints. This research reinforces the relevance of AGIL concept, particularly in the aspects of adaptation, integration, goal attainment, and latency in maintaining the economic function of the family.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi titik awal terbentuknya keluarga. Perkawinan lahir atas dorongan fitrah manusia yang saling menyukai dan memiliki keinginan untuk hidup berpasangan. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia meliputi keberlangsungan

ekonomi dan kebutuhan seksual menjadi pranata dalam keluarga (Awaru, 2021). Proses tumbuh dan berkembang dari setiap anggota keluarga akan menciptakan perubahan berupa tekanan yang harus dilalui dalam sebuah keluarga. Keluarga harus mempersiapkan respon untuk menghadapi kebutuhan anggota keluarga dari setiap waktu. Mempersiapkan diri dari segala bentuk kejadian, baik yang tidak direncanakan dari dalam keluarga maupun tekanan yang datang dari luar keluarga (Pratiwi, 2018). Perubahan struktur keluarga tersebut dapat dilihat secara nyata pada sistem keluarga saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, status dan peran antara suami-istri pada beberapa keluarga sama atau sederajat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Baik suami maupun istri memiliki kesempatan bekerja yang sama dengan alasan bervariasi dalam setiap sistem keluarga.

Mulai dari tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, pembuktian diri dimasyarakat, hingga pada pengembangan karier. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan fungsi yang berdampak juga pada perubahan struktur keluarga. Perubahan yang terjadi membutuhkan penyesuaian diri dari keluarga dengan cepat. Jika keluarga tidak dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan, maka akan terjadi disfungsi dalam keluarga.

Disfungsi dapat terjadi pada berbagai bentuk keluarga, tanpa memandang struktur, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Disfungsi muncul ketika anggota keluarga tidak mampu menjalankan peran dan tanggung jawab secara optimal, sehingga mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan keluarga (Muminah, 2024). Oleh karena itu, fenomena ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, terutama pada keluarga yang menghadapi tekanan sosial ekonomi yang kompleks.

Salah satu bentuk keluarga yang rentan mengalami disfungsi adalah keluarga ibu tunggal. Status sebagai orang tua tunggal merupakan sebuah fase baru yang dialami oleh seorang ibu tunggal dengan adanya perubahan fungsi dan peran dalam perekonomian, sosial, dan psikologi keluarga (Restiana, 2019). Ketidakhadiran salah satu orang tua yang umumnya terjadi diakibatkan karena salah satu orang tua meninggal dunia atau kedua orang tua bercerai (Iganingrat & Eva, 2021).

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika ibu tunggal harus menjalani masa pidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan, yang secara langsung membatasi akses warga binaan terhadap sumber daya ekonomi dan interaksi sosial. Pidanaan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi secara langsung menciptakan kekosongan dan tekanan ekonomi yang signifikan pada keluarga yang ditinggalkan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi warga binaan ibu tunggal untuk mengembangkan peran adaptif dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Prayadi & Subroto, (2022) menjelaskan bahwa sistem pidanaan memiliki metode dan pengaturan yang berpegangan pada nilai-nilai Pancasila dengan tujuan mengedepankan kualitas warga binaan melalui program yang terintegrasi antara pihak lapas dan kelompok masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan yakni warga binaan mampu diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan menjalani kehidupan yang wajar. Adanya program bimbingan kerja menjadi salah satu bentuk dari metode dan pengaturan pidanaan. Seluruh program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menerangkan bahwa subsistem

peradilan pidana menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian yang terdiri atas pembinaan mental dan rohani, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemandirian yang terdiri atas bimbingan kerja seperti membuat, salon, *bakery*, serta kerajinan tangan, dan pembinaan jasmani yang terdiri atas senam dan keterampilan seni (Saharuddin & Az, 2022). Sistem pembinaan tersebut mengarah pada kerangka yang mengatur bagaimana proses pembinaan dilakukan dengan tujuan warga binaan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan menghindari melakukan tindakan kriminal kembali agar dapat diterima dimasyarakat (Adiprabowo et al., 2025).

Pembinaan kemandirian dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah. Warga binaan memiliki beberapa hak terkait pembinaan kemandirian meliputi: mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapat jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja (Indrianingsih & Satory, 2025). Berkaitan dengan hak-hak tersebut, orientasi pembinaan kemandirian tidak berhenti sampai pada membangun keterampilan melainkan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan penghargaan terhadap produktivitas warga binaan.

Namun demikian, kajian yang ada umumnya masih menekankan pembinaan pemasyarakatan dalam perspektif kelembagaan dan normatif, serta belum secara spesifik mengkaji bagaimana strategi ekonomi dijalankan oleh kelompok rentan seperti ibu tunggal di dalam lapas dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengaitkan pembinaan kemandirian dengan praktik nyata strategi ekonomi warga binaan dalam konteks struktur keluarga yang terdampak langsung oleh pemenjaraan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana ibu tunggal sebagai warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga aktor yang mengembangkan strategi adaptif dalam mempertahankan fungsi ekonomi keluarga di tengah keterbatasan struktural lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pembinaan sebagai program institusional, tetapi juga sebagai ruang produksi sosial-ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji realisasi pemberdayaan atau pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Oktaviani & Dasa Putri, (2024) meneliti pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan bimbingan kerja di Lapas Kelas II A Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan bimbingan kerja membekali warga binaan keterampilan praktis, memberikan penghasilan tambahan, dan mendukung proses reintegrasi sosial dengan dampak positif signifikan pada kehidupan warga binaan. Jika dilihat dari aspek ekonomi, program bimbingan kerja di Lapas Kelas II A Padang memberikan penghasilan tambahan bagi warga binaan yang membantu memenuhi kebutuhan pribadi dan mengurangi beban ekonomi keluarga diluar lapas. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas pola ibu tunggal yang berstatus sebagai warga binaan memanfaatkan hasil pembinaan untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak melihat pembinaan sebagai program institusional, dan tidak menempatkan warga binaan sebagai aktor yang memiliki strategi adaptasi sosial ekonomi dalam keterbatasan ruang gerak.

Kajian mengenai warga binaan perempuan masih dominan membahas keberhasilan program pembinaan, sedangkan kajian yang melihat pengalaman sosial ekonomi ibu tunggal dalam memanfaatkan premi hasil kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga masih terbatas. Selain itu, penelitian dengan persoalan tersebut belum banyak dengan analisis perspektif sosiologis, terutama melalui Teori AGIL Talcott Parsons. Maka dari itu, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menyoroti ibu tunggal sebagai warga binaan membangun strategi keberlangsungan ekonomi keluarga melalui program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian ini berawal dari kondisi ibu tunggal sebagai warga binaan yang mengalami perubahan peran dalam keluarga akibat proses pemidanaan. Status sebagai ibu tunggal menyebabkan perempuan memikul tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan ekonomi keluarga secara bersamaan. Ketika menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, ruang gerak ibu tunggal menjadi terbatas sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga.

Ibu Tunggal

Ibu tunggal adalah kondisi dimana seorang ibu mengasuh serta membesarkan anak tanpa bantuan orang lain termasuk pasangannya (Iganingrat & Eva, 2021). Seseorang dapat menjadi orang tua tunggal karena berbagai faktor seperti perceraian atau kematian pasangan hidup yang turut menghadirkan tantangan baru. Ibu tunggal beberapa kali mengalami masalah yang digolongkan menjadi tiga aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek psikologis (Suhartini et al., 2024). Jika dilihat dari aspek sosial, kepercayaan diri ibu tunggal cenderung berkurang dan memilih untuk berdiam diri dirumah demi menghindari bahan perbincangan orang lain karena adanya stigma negatif masyarakat tentang ibu tunggal. Pada aspek ekonomi, keluarga ibu tunggal mengalami masalah keuangan yang tidak mencukupi segala kebutuhan keluarga, sementara jika dilihat dari aspek psikologis ibu tunggal sering menghadapi perasaan sedih, stress, dan kurangnya istirahat.

Ibu tunggal dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai status keluarga, tetapi lebih dari itu, ibu tunggal sebagai aktor sosial yang melakukan berbagai strategi adaptasi untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga. Adanya proses penyesuaian terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi menunjukkan kemampuan ibu tunggal dalam menjalankan fungsi domestik dan publik. Pandangan tersebut penting karena penelitian tidak hanya melihat ibu tunggal sebagai kelompok rentan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kemampuan bertahan dan membangun strategi ekonomi keluarga.

Pemasyarakatan

Dinamika yang panjang telah merambah ke sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dinamika tersebut mengubah konsep pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Istilah penjara perlahan mulai dihilangkan dengan lahirnya Lembaga Pemasyarakatan yang dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman Zaman Orde Lama (Pettanase, 2019). Pada masa penjajahan, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai konsep sebagai tempat pengasingan, tempat membuat manusia jera, dan balas dendam kepada manusia yang melakukan tindakan

kriminal dan juga melanggar hukum pemerintah. Pada saat konsep pemasyarakatan tersebut diaplikasikan di masa Indonesia yang sudah merdeka, akan mengundang banyak kritikan karena menghasilkan dampak yang tidak sesuai dengan teori pemidanaan yang tidak berlandaskan Pancasila (Safitri et al., 2021).

Indonesia menekankan proses pembinaan pada sistem pemasyarakatan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Mengembalikan warga binaan menjadi manusia yang mampu berfungsi untuk masyarakat dengan cara meningkatkan produktivitas merupakan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Fokus praktik pembinaan tidak hanya pada aspek moral dan sosial tetapi menekankan pengembangan keterampilan kerja untuk membangun kemandirian ekonomi warga binaan setelah bebas (Sujoko et al., n.d.).

Terdapat perbedaan karakteristik yang membedakan antara warga binaan perempuan dan warga binaan laki-laki, terutama tentang peran dan tanggung jawab keluarga. Khususnya, perempuan yang mempunyai status sebagai ibu tunggal dengan peran pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak. Fungsi keluarga akan terguncang akibat pemidanaan seorang ibu tunggal. (Indriastuti & Susanti, 2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa warga binaan tertekan secara emosional dan ekonomi akibat keterpisahan dengan anak serta dalam terbatas dalam menjalankan peran keibuan. Pemidanaan seorang ibu tunggal juga berdampak pada keberlangsungan fungsi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pembinaan kemandirian dalam lembaga pemasyarakatan menjadi penting sebagai sarana adaptasi ekonomi dan upaya mempertahankan fungsi keluarga dari dalam lapas.

Keberlangsungan Ekonomi

Keberlangsungan ekonomi dalam lingkup keluarga mengarah pada rumah tangga yang mampu dan mengelola sumber daya untuk mencukupi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ekonomi yang stabil bergantung pada tingkat pendapatan, keterampilan kerja, serta kemampuan dalam mengelola keuangan. Praktik konsumsi mendorong setiap manusia untuk dapat melanjutkan kelangsungan hidup (Djalal et al., 2022). Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, keluarga akan melakukan berbagai bentuk penyesuaian untuk mempertahankan stabilitas kehidupan rumah tangga.

Keberlangsungan ekonomi dalam keluarga ibu tunggal sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan sumber daya secara rasional dan selektif. Ibu tunggal mengutamakan kebutuhan dasar dibandingkan kebutuhan sekunder dan tersier. Strategi ini memperlihatkan bahwa praktik ekonomi keluarga tidak hanya berupa aktivitas konsumsi, tetapi juga mencerminkan upaya mempertahankan keberlanjutan kehidupan keluarga dalam situasi terbatas.

Teori AGIL Talcott Parsons

Keberlangsungan ekonomi dalam penelitian ini didukung oleh Lembaga Pemasyarakatan terkait yang merupakan sebuah sistem sosial. Menurut Parsons (1951) sistem sosial memerlukan empat fungsi AGIL Talcott Parsons yang terdiri atas fungsi *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency* (L). Pernyataan ini turut didukung oleh (Aulia & Aji, 2024) yang menjelaskan bahwa *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, dan *latency* menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan suatu sistem sosial.

Ibu tunggal dalam aspek *adaptation* ditunjukkan melalui upaya penyesuaian diri dengan lingkungan lapas melalui pemanfaatan program pembinaan kerja untuk

memperoleh penghasilan. Pada aspek *goal attainment*, ibu tunggal memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan ekonomi keluarga meskipun dalam lapas. Pada aspek *integration*, keberlangsungan ekonomi dipengaruhi oleh hubungan dan dukungan sosial antara warga binaan, keluarga, serta institusi masyarakat. Sementara aspek *latency* terlihat dari upaya ibu tunggal mempertahankan nilai tanggung jawab keibuan dan motivasi bekerja demi masa depan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus menurut Robert K. Yin untuk meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam dan menyeluruh. Studi kasus digunakan ketika penelitian berfokus pada pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terhadap suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Nur’aini, 2020). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kondisi nyata ibu tunggal sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam menjalankan peran terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan Februari hingga Maret 2026, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dengan kriteria: (1) ibu tunggal yang memiliki tanggungan, (2) mengikuti program pembinaan, (3) bekerja dibengkel kerja ataupun lainnya, dan (4) memperoleh upah atau premi. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 8 informan yang terdiri dari 5 ibu tunggal sebagai informan kunci, 3 petugas lapas pada bagian pembinaan kemandirian yang mengkoordinasi semua kegiatan yang ada didalam bengkel kerja.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan secara terpisah kepada setiap informan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, namun tetap fleksibel untuk menggali informasi lebih dalam sesuai respons informan. Wawancara difokuskan pada eksplorasi pengalaman, tantangan, strategi pemenuhan peran ekonomi serta pandangan informan terhadap program pembinaan yang diterapkan. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati aktivitas keseharian warga binaan yang bekerja di dalam bengkel kerja mulai dari unit bakery, membuat, dan menjahi. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, catatan lapangan, dan rekaman audio wawancara sebagai data pendukung dan bukti autentik proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yakni reduksi data, data display, dan verifikasi (Spradley & Huberman, 2024). Peneliti dalam tahap reduksi data menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan peran ibu tunggal sebagai warga binaan dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Data yang dipilih difokuskan pada pengalaman menjalankan peran ganda, strategi pemenuhan kebutuhan keluarga, pemanfaatan premi hasil kerja, serta bentuk adaptasi ibu tunggal selama mengikuti program pembinaan kemandirian didalam lapas.

Tahap data display dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan tema penelitian. Selanjutnya, tahap verifikasi dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama proses penelitian. Tahap

verifikasi, peneliti menafsirkan makna data untuk memperoleh pemahaman mengenai ibu tunggal dalam menjalankan peran.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini menjelaskan praktik peran ibu tunggal sebagai warga binaan dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga yang dianalisis melalui teori struktural fungsional dengan konsep AGIL dari Talcott Parsons, serta dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu. Analisis difokuskan pada tema-tema utama yang ditemukan dilapangan seperti, pemanfaatan program bimbingan kerja, strategi ekonomi, dukungan keluarga, serta makna ekonomi bagi keberlangsungan hidup keluarga.

Peran Ibu Tunggal dalam Mempertahankan Keberlangsungan Ekonomi

Penelitian ini menemukan bahwa ibu tunggal sebagai warga binaan Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga melalui strategi yang bersifat tidak langsung, adaptif, dan terbatas secara struktural. Pola ini dalam perspektif Parsons (1951) menyatakan bahwa ibu tunggal memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan mengumpulkan sumber-sumber kehidupan, komoditas, dan redistribusi sosial. Program kemandirian di Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bukan sekadar aktivitas untuk mengisi waktu, melainkan sebuah orientasi rehabilitasi yang dirancang untuk mempersiapkan warga binaan dengan keahlian praktis dan mentalitas kerja. Ibu tunggal yang dipenjarakan mendapatkan tantangan yang serius terutama terkait dengan keberlangsungan ekonomi keluarga.

Ibu tunggal dalam teori struktural fungsional bukan hanya individu yang berjuang secara personal, melainkan bagian dari mekanisme sistem yang berupaya keras mengembalikan keseimbangan sosial ketika struktur keluarga mengalami perubahan drastis. Ibu tunggal membuktikan bahwa fungsi keluarga tetap dapat berjalan melalui strategi adaptif. Keberhasilan menjalankan keberlangsungan ekonomi ibu tunggal dari balik jeruji besi tidak terlepas dari program kemandirian didalam lapas. Program ini merupakan bagian dari sistem yang menyediakan sarana bagi warga binaan untuk menjalankan fungsi. Secara struktural, ibu tunggal memiliki keterbatasan dalam mengakses pasar kerja bebas sehingga tercipta ruang produksi didalam lapas.

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dengan lima narasumber utama yang merupakan ibu tunggal di Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Rentang usia narasumber berada diangka 21 hingga 41 tahun, dengan tanggung jawab nafkah rata-rata 1-4 orang anak. Dari lima narasumber, satu narasumber tidak mengikuti program bimbingan kerja didalam lapas. Narasumber hanya mengikuti pembinaan kepribadian dan pembinaan jasmani. Empat narasumber yang lain memiliki pengalaman bekerja di bengkel kerja, mulai dari sektor tata boga (*bakery*), sektor jasa (salon), dan sektor tata busana (menjahit dan membatik).

Salah satu narasumber yakni ibu IN (33 tahun) seorang ibu tunggal dengan tanggungan nafkah 4 anak mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga dengan pola kerja melalui bengkel kerja yang ada didalam Lembaga Pasyarakatan Kelas IIA Semarang, perolehan premi setiap bulan, serta upaya mencari alternatif sumber penghasilan lain. Narasumber IN terlibat dalam kegiatan dibengkel kerja pada unit *bakery* Lapas. Keterlibatan IN dalam unit *bakery*

didapatkan setelah IN mengikuti pelatihan *bakery* yang diadakan LPP Semarang. Keikutsertaan IN didalam bengkel kerja lapas menjadi titik balik penting dalam membangun ketahanan ekonomi dengan ruang gerak yang terbatas didalam lapas. Selain itu, sebelum bekerja di unit *bakery*, IN pernah memiliki pengalaman bekerja di salon lapas selama 1 tahun 8 bulan. Seluruh kegiatan yang ada didalam bengkel kerja beroperasi setiap Senin sampai Jumat dari pukul 08.00 hingga 16.00.

Data tersebut menunjukkan bahwa ibu tunggal sebagai warga binaan tidak bersikap pasif terhadap keterbatasan ekonomi yang dialami. Narasumber berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan lapas melalui berbagai strategi dengan melakukan adaptasi memanfaatkan peluang kerja yang tersedia didalam lapas. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan ruang gerak yang dialami ibu tunggal tetapi ibu tunggal tetap berusaha agar kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Menurut Parsons, *adaptation* merupakan kemampuan individu atau sistem sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup. Strategi kerja yang dilakukan warga binaan di LPP Semarang menunjukkan bentuk adaptasi (A) dalam kerangka AGIL, di mana individu menyesuaikan diri terhadap keterbatasan struktural lapas.

IN tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis dari pelatihan, tetapi IN mendapatkan tambahan nilai ekonomi dari mengumpulkan premi secara konsisten. Bagi seorang ibu tunggal dengan empat orang anak, setiap rupiah dari hasil premi memiliki nilai krusial untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Warga binaan yang bekerja di bengkel kerja menyimpan premi dibuku tabungan. Nominal premi bisa berubah setiap bulannya karena bergantung pada pendapatan. Premi yang diperoleh dulu saat bekerja disalon dan *bakery* ditabung untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Nilai tanggung jawab terhadap anak yang tetap diperlihara dengan memprioritaskan premi hasil kerja untuk kebutuhan anak merupakan bentuk *Latency* (L) dalam kerangka AGIL.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan anak-anak masih didukung oleh mantan suami yang mencukupi kebutuhan penting, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan ekonomi dari mantan suami kepada anak-anak IN menunjukkan bentuk *Integration* (I) dalam skema AGIL. Dukungan tersebut mencerminkan masih berjalannya hubungan sosial dan fungsi keluarga meskipun struktur keluarga telah mengalami perubahan. Pemenuhan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak menjadi bentuk kerja sama sosial yang membantu menjaga stabilitas keluarga selama IN menjalani masa pidana. Dengan adanya dukungan tersebut, keberlangsungan kebutuhan dasar anak tetap terjaga sehingga IN dapat memfokuskan premi hasil kerjanya untuk kebutuhan penunjang anak lainnya, seperti yang disampaikan IN dalam wawancara pada 12 Januari 2026 bahwa:

“ini boleh dipakai tapi hanya untuk anak-anak kayak misalnya mah aku butuh bayar les gitu boleh, ini boleh banget yang disini pokok dari *bakery* itu boleh, tapi tidak mengganggu uang yang ini, ya mau ngga mau harus cukup”

Keterbatasan nominal premi yang diterima menjadi salah satu alasan IN mencari sumber penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama bengkel kerja. Variasi jumlah premi yang diterima setiap bulan dapat dilihat pada dokumentasi berikut.

LAPORAN KEGIATAN BENDUKER

HASIL	K E T.	NO	JENIS PRODUKSI	HARGA SATUAN	PREMI
PRODUKSI	- Keramik - Borden - Plastik - Apakasa - Abuwang - Sulam Perang - Kembang - Renda - Payet - Mole - Welbo - Hantaran - Tas Go Green - Cutton buds	1	Gendak	4 Orang	Rp. 3.875.670
		2	Salon	2 Orang	Rp. 808.000
		3	Laundry	4 Orang	Rp. 2.559.145
		4	Batik	9 Orang	Rp. 2.828.050
		5	Keterampilan	16 Orang	Rp. 3.929.950
		6	Hidroponik	1 Orang	Rp. -
		7	Perikanan	1 Orang	Rp. -
		8	Tata Boga	4 Orang	Rp. 3.033.334
		9	Cutton Buds	61 Orang	Rp. -
		10	Bakery	11 Orang	Rp. 6.714.702
Total:				113 Orang	23.749.751

Gambar 1. Foto nominal bulan Januari 2026
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Hasil penelitian pada narasumber DK (41 tahun) menunjukkan bahwa keberlangsungan ekonomi keluarga tetap berjalan melalui kombinasi dukungan eksternal dan strategi adaptasi individu. DK tidak berperan sebagai penopang utama ekonomi anak karena seluruh kebutuhan tiga anaknya dipenuhi oleh mantan suami, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ekonomi keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan anak telah dialihkan kepada pihak lain sebagai bentuk pembagian peran dalam keluarga pascaperceraian. Disisi lain, DK tetap melibatkan diri dengan mengikuti kegiatan dekorasi lapas, meskipun dengan premi yang tidak pasti. Maka dari itu, terbentuk aspek *Adaptation* (A) dalam skema AGIL karena ketidakpastian penghasilan dari unit dekor sehingga mendorong DK untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menjadi buruh cuci yang merupakan penghasilan tetap setiap bulan.

Berbeda dengan narasumber lainnya, DK berada dalam kondisi yatim piatu sehingga tidak lagi memiliki dukungan finansial dari keluarga inti. DK tercatat tidak pernah meminta apapun maupun menerima kiriman materi dari rumah, mengingat tanggung jawab moral yang justru DK rasakan terhadap adik diluar. Selain itu, DK sudah memiliki rencana pasca bebas yaitu membuka usaha angkringan. Hal ini menunjukkan adanya bentuk *Goal Attainment* (G) dalam skema AGIL yang terlihat dari adanya tujuan ekonomi jangka panjang. Tujuan tersebut mencerminkan adanya orientasi masa depan dan usaha untuk mencapai kemandirian ekonomi di luar lingkungan lapas. Dengan demikian, DK tidak hanya bertahan dalam kondisi saat ini, tetapi juga memiliki strategi untuk mencapai kehidupan ekonomi yang lebih stabil setelah menjalani masa pidana.

Berlawanan dengan profil ekonomi IN dan DK yang masih mendapatkan dukungan ekonomi dari mantan suami untuk membantu memenuhi kebutuhan anak, tiga narasumber lain meliputi C (21 tahun), VE (25 tahun), dan M (32 tahun) tidak mendapatkan dukungan ekonomi dari mantan suami. Kondisi ini menuntut para ibu tunggal untuk mengandalkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Meskipun mantan suami tidak menafkahi anak-anak, pada kasus C (21 tahun) yang memiliki 2 anak mendapat bantuan finansial dari orang tua mantan suami, karena kondisi mantan suami C sedang menjalani masa hukuman. Orang tua mantan suami memenuhi biaya pendidikan sedangkan orang tua C memenuhi kebutuhan sehari-hari anak. Selain itu, orang tua C juga mengisi peran pengasuhan anak karena kedua anak C tinggal bersama orang tua C. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ekonomi dan pengasuhan anak tetap berjalan melalui dukungan keluarga besar meskipun struktur keluarga inti mengalami disfungsi.

Di sisi lain, C tidak bersikap pasif terhadap kondisi tersebut. Justru menunjukkan inisiatif tinggi dengan mengambil berbagai pekerjaan yang tersedia di dalam lapas, seperti bekerja di unit membatik, piket kurve, dan menjadi buruh cuci. Premi dari hasil kerja di unit membatik tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di dalam lapas, tetapi juga ditabung sebagai modal usaha pasca bebas berupa kopi keliling. Hal ini menunjukkan adanya orientasi kemandirian ekonomi dan kesadaran untuk mempersiapkan masa depan setelah keluar dari lapas. Dengan demikian, C menunjukkan kombinasi antara dukungan eksternal dari keluarga dan usaha adaptif individu dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi.

Hasil penelitian pada VE (25 tahun) dan M (32 tahun) menunjukkan bahwa keberlangsungan ekonomi keluarga selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang berlangsung dengan pola yang berbeda, namun tetap mengarah pada pemenuhan kebutuhan anak. Pada VE, tidak adanya dukungan ekonomi dari mantan suami membuat peran pengasuhan sepenuhnya ditopang oleh orang tua VE, sementara VE sendiri tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak secara mandiri melalui pekerjaan di unit menjahit dan buruh cuci. VE menunjukkan sikap tanggung jawab yang tinggi dengan memprioritaskan kebutuhan anak serta tidak meminta bantuan ekonomi dari orang tua, melainkan berusaha mengandalkan kemampuan diri di dalam lapas.

Berbeda dengan VE, M tidak mengikuti program pelatihan kerja sehingga tidak memperoleh penghasilan dari dalam lapas. Namun, kebutuhan anak tetap terpenuhi karena M masih menerima gaji sebagai ASN selama menjalani hukuman. Dalam hal ini, orang tua M berperan dalam pengasuhan anak, sementara M tetap menjaga kesinambungan ekonomi keluarga melalui sumber pendapatan formal dari luar lapas. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pemenuhan ekonomi berbeda, baik VE maupun M tetap mampu menjaga keberlangsungan kebutuhan anak melalui kombinasi antara dukungan keluarga dan sumber daya ekonomi yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ibu tunggal sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dapat dianalisis menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons melalui skema AGIL. Aspek *Adaption* (A) ditunjukkan dari para narasumber yang mampu menyesuaikan diri meskipun dengan kondisi keterbatasan didalam lapas. Menabung premi untuk biaya pendidikan serta sebagai tabungan dalam merencanakan kemandirian ekonomi pasca bebas untuk memenuhi kebutuhan anak tanpa bergantung pada orang tua. Hal tersebut mencerminkan bahwa para ibu tunggal memiliki tujuan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga, memastikan kesejahteraan anak, serta mempersiapkan masa depan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Maka dari itu, uraian tersebut masuk kedalam aspek *Goal Attainment* (G) karena adanya tujuan yang jelas.

Dalam penelitian ini, aspek *Integration* (I) dilihat dari warga binaan yang terlibat dalam program pembinaan serta hubungan sosial yang terjalin baik didalam lapas. Para narasumber menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan lapas dengan terlibat dalam kegiatan pembinaan dan dukungan dari keluarga memperkuat aspek integrasi. Nilai tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan, dan kasih sayang terhadap anak menjadi motivasi utama para ibu tunggal dapat dilihat sebagai aspek *Latency* (L). Prioritas penggunaan premi untuk kebutuhan anak, berusaha mandiri tanpa membebani anggota keluarga lainnya, meningkatkan keterampilan, serta mempertahankan integritas sebagai ASN merupakan bentuk *Latency* warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Dengan demikian, peran ibu tunggal didalam lapas tidak terhenti oleh keterbatasan ruang dan kebebasan, melainkan tetap dijalankan secara adaptif dan tanggung jawab.

Pembinaan Kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Mendukung Keberlangsungan Ekonomi Warga Binaan

Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menerangkan bahwa peraturan tersebut mengatur tata cara pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta bimbingan lanjutan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan agar kembali ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengambil peran penting melalui pemberian pelatihan kepada warga binaan untuk menjadi bekal dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi setelah bebas.

Bentuk implementasi dari peraturan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mewujudkan dengan menciptakan berbagai program pembinaan yang berorientasi pada pemberdayaan. Bentuk-bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA meliputi, pelatihan membatik, pelatihan bakery, pelatihan menjahit, salon, perikanan, tata boga, hidroponik dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan pembinaan kemandirian berpusat di bengkel kerja lapas yang terdapat di halaman tengah lapas.

Bab ini memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga narasumber yang merupakan petugas pada bagian kemandirian di LPP Semarang. Penelitian ini melihat bentuk pembinaan kemandirian pada sektor pelatihan membatik, menjahit dan bakery. Ketiga sektor tersebut menghasilkan produk unggulan dari LPP Semarang. Sebelum warga binaan aktif bekerja didalam bengkel kerja, warga binaan mengikuti pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh pihak lapas ataupun kerjasama antara pihak lapas dengan kelompok masyarakat. Pada tahun 2026, total warga binaan yang tercatat mengikuti pelatihan keterampilan sejumlah 46 warga binaan dan yang aktif bekerja di bengkel kerja dan memperoleh premi yakni 39 warga binaan. Tidak semua warga binaan bisa mendapatkan premi hanya warga binaan yang sudah terampil. Semua warga binaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pelatihan keterampilan.

Secara keseluruhan, warga binaan dengan kasus tindak pidana umum yang aktif berkegiatan di bengkel kerja, karena ini membantu warga binaan dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat. Bagi warga binaan dengan tindak pidana umum yang sudah menjalani 2/3 dari vonis hukuman dapat mengurus Pembebasan Bersyarat tersebut dengan mempertimbangkan riwayat perilaku warga binaan selama didalam lapas. Setiap warga binaan mempunyai catatan perilaku seperti

layaknya buku raport yang mencatat semua kegiatan warga binaan. Untuk tindak pidana korupsi, catatan perilaku tidak mempengaruhi pengurusan kebebasan. Maka dari itu, banyak dari warga binaan dengan kasus tindak pidana korupsi jarang mengikuti program bimbingan kerja didalam lapas.

Setelah menjalani 1/3 dari masa hukuman, warga binaan berhak mendapatkan pembinaan. Pembinaan yang ada di LPP Semarang meliputi pembinaan kepribadian meliputi: spiritual, kesehatan, bela negara dan pembinaan kemandirian meliputi: keterampilan, pelatihan, dan *life skill*. Lapas menyediakan bengkel kerja dengan mengacu undang-undang karena lapas adalah milik negara. Dengan adanya sumber penghasilan alternatif lain selain upah atau premi, seperti menjadi buruh cuci dan lain sebagainya hal tersebut diluar kebijakan lapas. Pencarian sumber penghasilan lain merupakan inisiatif dari masing-masing warga binaan.

Bagi pihak lapas, warga binaan yang aktif dibengkel kerja memiliki kesiapan atau kemampuan ekonomi yang lebih sejahtera. Manfaat berkegiatan di bengkel kerja bagi warga binaan selama didalam lapas yaitu mendapatkan premi untuk mencukupi kebutuhan individu selama menjalani masa hukuman dan menciptakan kemantapan hati untuk membuka usaha sehingga setelah bebas warga binaan dapat mencapai kemandirian.

LPP Semarang memberikan pembinaan secara menyeluruh kepada semua warga binaan. Perempuan 18 tahun ke atas menjadi fokus utama dalam sistem pemasyarakatan. Diantara keseluruhan warga binaan di LPP Semarang terdapat latar belakang sosial yang beragam, termasuk ibu tunggal. Aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek psikologis menjadi perhatian yang dilakukan lapas terhadap ibu tunggal. Lebih lanjut, LPP Semarang melihat pembinaan akan berhasil ketika warga binaan memperoleh keterampilan serta dapat menciptakan usaha mandiri. Bengkel kerja menjadi instrumen penting dalam mendukung reintegrasi sosial serta keberlangsungan ekonomi.

Dalam perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons, kondisi tersebut dapat dijelaskan aspek *Adaptation* (A) terlihat dari kemampuan lembaga menyediakan pelatihan dan warga binaan menyesuaikan diri melalui keterampilan kerja serta upaya memperoleh penghasilan. Aspek *Goal attainment* (G) tercermin dari tujuan pembinaan untuk membekali warga binaan agar siap kembali ke masyarakat secara mandiri. Aspek *Integration* (I) tampak dari keteraturan sistem pembinaan, aturan lapas, serta hubungan sosial yang terbangun dalam proses pelatihan. Sementara itu, aspek *Latency* (L) terlihat dari internalisasi nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian yang dibentuk melalui program pembinaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan yang memiliki keterampilan, kemandirian ekonomi, dan kesiapan reintegrasi sosial. Bengkel kerja menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan tersebut, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh partisipasi, motivasi, serta karakteristik masing-masing warga binaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ibu tunggal sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

menjalankan strategi keberlangsungan ekonomi melalui kombinasi kerja di bengkel kerja, perolehan premi, serta pekerjaan alternatif seperti buruh cuci dan piket kurve. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sistem formal yang disediakan lembaga, tetapi juga pada inisiatif individu dan dukungan sosial dari keluarga. Dalam konteks ini, pembinaan kemandirian yang dilakukan lapas berfungsi sebagai instrumen penting dalam membentuk kapasitas ekonomi sekaligus kesiapan reintegrasi sosial warga binaan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritik berupa penguatan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga berfungsi sebagai sistem sosial yang membentuk kembali peran ekonomi dan nilai individu dalam keluarga. Dari sisi kontribusi penelitian, temuan ini menunjukkan bahwa ibu tunggal sebagai warga binaan tidak sepenuhnya pasif dalam sistem pembinaan, melainkan aktif membangun strategi ekonomi yang bersifat adaptif dan berlapis. Hal ini memperluas pemahaman bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh program lembaga, tetapi juga oleh agensi individu dan dukungan struktur sosial di luar lapas.

Adapun implikasi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan agar LPP Semarang memperluas akses dan keberlanjutan program bengkel kerja dengan memperhatikan pemerataan kesempatan antarwarga binaan, termasuk peningkatan konsistensi pemberian premi dan penguatan keterampilan berbasis kewirausahaan. Selain itu, perlu adanya penguatan program pasca-bebas (aftercare program) agar keterampilan yang diperoleh selama pembinaan benar-benar dapat diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi nyata setelah kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan kemandirian di lapas tidak hanya berfungsi sebagai program pelatihan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang berkontribusi dalam pembentukan kemandirian ekonomi, penguatan nilai sosial, serta keberhasilan reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat.

REFERENSI

- Angin, E. R. (2019). Peran ganda ibu single parent dalam keluarga perempuan penyapu jalan di Kota Bontang, Kalimantan Timur. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 183-194. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/09/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(09-01-19-12-48-48\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/09/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(09-01-19-12-48-48).pdf)
- Aulia, A. T., & Aji, A. (2024). Hubungan Antara Literasi Lingkungan Dengan Kemampuan Memecahkan Masalah Lingkungan Pada Peserta Didik di Sekolah Adiwiyata SMA N 4 Semarang. *Edu Geography*, 11(3), 1-9. <https://doi.org/10.15294/edugeo.v11i2.69710>
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur*, 16(1), 92-104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Endiana, I. D. M., & Suryandari, N. N. A. (2021). Opini going concern: Ditinjau dari agensi teori dan pemicunya. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 5(2), 224-243. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4490>

- Hidayat, M., & Subroto, M. (2022). Penerapan Konsep Community Based Correction dalam Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 323-332. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4312>
- Lestari, P., & Pratiwi, P. H. (2018). Perubahan Dalam Struktur Keluarga. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i1.21053>
- Iganingrat, A., & Eva, N. (2021). Kesejahteraan Psikologis pada Ibu Tunggal: Sebuah Literature Review. *Buku Abstrak Seminar Nasional*, (April), 444-451. <https://conference.um.ac.id/index.php/psi/article/viewFile/1168/607>
- Indrianingsih, P., & Satory, A. (2025). *Analisis Etika dan Keadilan dalam Seleksi Tenaga Kerja dengan Hak Premi dari Warga Binaan Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba (Ethical and Justice Analysis in the Selection of Inmate Workers with Wages: A Case Study at . 1-21.* <https://repository.bakrie.ac.id/12857/2/Jurnal%20Prita%20Indrianingsih%20-%202251011070.pdf>
- Muminah, S. (2024). Relasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Pada Keluarga Single Parent Di Desa Kadubereum Kabupaten Serang. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 704-752. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14582014>
- Oktaviani, T. I., & Dasa Putri, L. (2024). Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Melalui Kegiatan Bimbingan Kerja (BINJA) (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Padang). *Jurnal Family Education*, 04(3), 566-572. <https://doi.org/10.24036/jfe.v4i3.245>
- Prayadi, T., & Subroto, M. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4, 662-666. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4428>
- Rosyad, A. A. (2018). Analisis keberlangsungan usaha mikro Malang Raya (tinjauan perspektif ekonomi Islam). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4933/4334>
- Safitri, M. A., Anggraeni, R., Hamid, A., & Tridewiyanti, K. (2021). *URGENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGATURAN*. 01(02), 247-265. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.19>
- Saharuddin, S., & Az, M. G. (2022). Pemenuhan Hak bagi Narapidana Berupa Upah Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7986>
- Tenri Awaru, A. O. (2021). Sosiologi keluarga. Universitas Negeri Makasar. <https://eprints.unm.ac.id/23261/1/Buku%20Digital%20-%20SOSIOLOGI%20KELUARGA.pdf>